

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (54/bersambung)
Fasilitas Kredit Tidak Sesuai SK Direksi

SEMARANG— Nah, ini lagi temuan miris atas pengelolaan Bank Jateng yang bermasalah. Temuan-temuan selama ini sekaligus menjadi preseden buruk bagi bank yang menggunakan tagline “Banknya Orang Jawa Tengah” ini. Tidak salah jika kepercayaan nasabah terhadap bank pemerintah ini semakin menurun.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menemukan adanya jangka waktu kredit atas 15 fasilitas kredit proyek tidak sesuai surat keputusan (SK) Direksi tentang kredit proyek. Nilai dari 15 fasilitas kredit itu mencapai Rp 53.550.000.000,-.

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas operational pada PT bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai dengan

**BANK JATENG
BERMASALAH**



bu-
lan Juli. Pemeriksaan dilakukan di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan Jakarta.

LHP BPK RI yang ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng itu tertanggal 11 Desember 2014, dengan nomor 446/LHP/BPK/XVIII.

SMG/12/2014.

Dalam LHP tersebut disampaikan bahwa kredit proyek merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada badan hukum, badan usaha, ataupun perorangan yang bergerak di bidang pembangunan fisik maupun penyedia barang/jasa. Untuk mengatur pemberian kredit proyek tersebut, PT Bank Jateng telah menerbitkan SK Direksi No.308/HT.01.01/2012 tanggal 13 Agustus

2012 tentang Kredit Proyek.

Dalam SK tersebut yang antara lain mengatur tentang jangka waktu pemberian kredit dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum diberi fasilitas kredit.

Berdasarkan pemeriksaan atas kredit pada enam kantor cabang, yaitu Cabang Utama, Tegal, Pati,

■ Baca FASILITAS...hal 7

FASILITAS

dari hal 1

Banjarnegara, Magelang dan Karanganyar, diketahui bahwa ketentuan tentang jangka waktu dan persyaratan kredit proyek tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepada Cabang Utama, Pati, Tegal, Banjarnegara, Magelang, Karanganyar, Surakarta dan Jakarta agar

memonitor dan memastikan pelunasan atas 15 fasilitas kredit proyek sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
(udi/muz)